



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA SILA KUSNA JAYA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 95343

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.590.000.000

1. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/60 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 910.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
3. MOBIL, VOLKSWAGEN VW 1300 Tahun 1973, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
4. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLETCLASIC Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
5. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO MOBIL PENUMPANG (DAKAR 4X2)
Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. MOTOR, GASGAZ MONKEY SPD MOTOR SOLO Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



7. MOTOR, HONDA VARIO SPD MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
8. MOTOR, PIAGGIO GTS IGET 150 ABS A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
9. MOTOR, KAWASAKI ER650H Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
10. MOBIL, JEEP CHEROKEE Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	586.970.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	245.717.888
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.332.687.888
III. HUTANG	Rp.	98.134.021
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.234.553.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.